

B A B III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

Berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar, maka terdapat beberapa identifikasi permasalahan terkait pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Makassar Sebagai organisasi sosial-ekonomi, koperasi memiliki karakteristik yang sesuai untuk dapat mengelola berbagai potensi yang dimiliki Indonesia secara lebih optimal, baik keragaman sumber daya alam hayati maupun keragaman sosial-budaya. Peran koperasi tersebut di wujudkan melalui kegiatan usaha kolektif yang melibatkan partisipasi aktif antara perempuan dan laki-laki dalam kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran. Koperasi juga berperan untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif anggotanya, baik yang berstatus sebagai produsen maupun konsumen. Efisiensi dan efektivitas usaha anggota koperasi dapat dicapai karena pemasaran, pembelian input produksi, pemanfaatan modal (simpan pinjam), dan pengadaan serta penggunaan fasilitas usaha di lakukan secara bersama. Kebersamaan ini akan mengurangi resiko persaingan di antara anggota (zerosumgame), meningkatkan posisi tawar terhadap pihak eksternal, dan menghasilkan manfaat yang adil (positive sumgame). Ke depan, koperasi perlu difasilitasi untuk terlibat aktif dalam rantai pasok (supply chain) dengan melibatkan sebanyak-banyaknya anggota laki-laki dan perempuan dari jumlah anggota koperasi. Koperasi tidak saja berperan sebagai faktor pencipta produktivitas dan nilai tambah bagi produk anggotanya, namun juga menjalankan fungsi konektivitas antara sektor primer dan sektor sekunder. Fungsi konektivitas tersebut dapat di kembangkan lebih lanjut oleh koperasi melalui penyediaan jasa-jasa usaha (penyimpanan, pengendalian mutu, pengemasan, pengangkutan, sarana pemasaran, dll.). Pada saat yang sama, kapasitas koperasi untuk meningkatkan kualitas penghidupan anggota koperasi, sekaligus memperkuat modal sosial di masyarakat, perlu di perkuat. Hal ini dapat diwujudkan melalui layanan koperasi di bidang pendidikan, pelatihan, kesehatan, pengadaan perumahan dan fasilitas lainnya. Seiring dengan globalisasi, peran koperasi juga di butuhkan sebagai platform usaha bersama bagi UKM di Indonesia dalam menghadapi persaingan yang semakin intensif. Melalui koperasi, UKM dapat mengembangkan berbagai produk unggulan dengan skala volume

dan kualitas yang memadai. Kelembagaan dan usaha koperasi juga di perkuat dengan rencana perbaikan peraturan perundangan.

Dari kondisi di atas, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dan dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menjalankan tugas pelayanannya. Permasalahan tersebut adalah:

1. Para pengelola KUKM belum profesional dan akuntabel dalam pengelolaan kelembagaan dan usaha;
2. Para pengelola KUKM baik laki-laki dan perempuan belum mampu untuk berinovasi dalam pengembangan produk;
3. Kemampuan dalam mengakses teknologi informasi, jaringan produksi dan pemasaran masih sangat rendah;
4. Masih banyak pengelola Koperasi dan UMKM baik laki-laki dan perempuan yang berorientasi dan bergantung pada bantuan pemerintah;
5. Fungsi kelembagaan dan infrastruktur Koperasi dan UMKM belum optimal terutama pembiayaan dan pemasaran

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi terkait pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Makassar sebagai berikut :

1. Prosentase jumlah Koperasi yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan prosentase jumlah Koperasi aktif masih belum maksimal yang disebabkan beberapa faktor sebagai berikut :
 - a. Keterbatasan jangkauan pelayanan, fasilitasi dan pembinaan KUKM
 - b. Keterbatasan anggaran/alokasi anggaran relatif kecil
 - c. Sumber daya aparatur yang terbatas berbanding dengan tingkat pertumbuhan Koperasi yang cukup signifikan
2. Seluruh potensi Koperasi dan UMKM belum didata secara maksimal yang disebabkan beberapa faktor sebagai berikut :
 - a. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses pembinaan dan pelayanan sehingga sumber data masih minim
 - b. Terdapat Koperasi dan UMKM yang pindah lokasi atau tutup tanpa pemberitahuan tertulis kepada Dinas Koperasi dan UMKM.
 - c. Keterbatasan anggaran/alokasi anggaran relatif kecil
 - d. Sumber daya aparatur yang terbatas berbanding dengan tingkat pertumbuhan Koperasi yang cukup signifikan
3. Belum maksimalnya promosi produk unggulan Koperasi dan UMKM yang disebabkan beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan event promosi produk unggulan Koperasi dan UMKM melalui penyediaan anggaran yang berkesinambungan
- b. Sinergitas dan kerjasama dengan program Nasional dan Kementerian.
- 4. Fasilitasi program pembiayaan kepada Koperasi dan UMKM terdapat beberapa kendala sebagai berikut :
 - a. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses pembinaan dan pelayanan sehingga sumber data masih minim
 - b. Orientasi mendirikan Koperasi dan UMKM hanya untuk mendapatkan bantuan modal dan bukan untuk pengembangan usaha sehingga usaha tidak berjalan maksimal.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
Prosentase jumlah Koperasi yang melakukan RAT	Jumlah Koperasi pada tahun 2015=1528 Unit. Jumlah Koperasi aktif=728 Unit. Jumlah Koperasi yang melakukan RAT=230 Unit(31.59 %), sedangkan Jumlah Koperasi tahun 2016 = 1528 unit. Jumlah Koperasi aktif =	- Tingkat perkembangan keanggotan (jumlah absolut dan jumlah relatif)	- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap jalannya usaha perkoperasian	- Permasalahan internal Koperasi yang tidak dikoordinasikan dengan Dinas Koperasi dan UKM	- Keterbatasan jangkauan pelayanan, fasilitasi dan pembinaan KUKM

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
	808 unit. Jumlah Koperasi yang melakukan RAT = 220 Unit (27.23%)				
		- Hasil penjualan koperasi kepada anggota modal penyertaan para anggota, modal penyertaan para anggota, cadangan, sisa hasil usaha/ keuntungan, dan rabat.			- Keterbatasan anggaran/alokasi anggaran relatif kecil
					- Sumber daya aparatur yang terbatas berbanding dengan tingkat pertumbuhan Koperasi yang cukup signifikan
Prosentase jumlah Koperasi yang aktif	- Pertumbuhan Koperasi tahun 2016 : 1528 unit Koperasi, jumlah anggota Koperasi sebanyak 227.030 Koperasi, Volume usaha Koperasi pada tahun 2013 sebesar Rp.638.74	- % Koperasi yang berusaha diberbagai bidang	- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap jalannya usaha perkoperasian	- Kurangnya sinergitas antara Koperasi dan Dinas Koperasi dan UKM	- Keterbatasan jangkauan pelayanan, fasilitasi dan pembinaan KUKM

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
	1.487.000,- - Modal sendiri Koperasi sebesar Rp. 409.532.429.000,- - Modal luar sebesar Rp.100.362.982.000,-				
		- Jumlah koperasi yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan.			- Keterbatasan anggaran/alokasi anggaran relatif kecil
					- Sumber daya aparatur yang terbatas berbanding dengan tingkat pertumbuhan Koperasi yang cukup signifikan
Cakupan Koperasi dan UKM yang dilakukan pendataan Database Koperasi dan UKM	- Pertumbuhan Koperasi tahun 2016 : 1528 unit Koperasi, jumlah anggota Koperasi sebanyak 227.030 Koperasi, Volume usaha Koperasi pada	- Tingkat perkembangan keanggotaan (jumlah absolut dan jumlah relatif)	- Belum dimilikinya seluruh potensi KUKM secara up to date	- Terdapat Koperasi dan UKM yang pindah lokasi atau tutup tanpa pemberitahuan kepada Dinas Koperasi dan UKM	- Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses pembinaan dan pelayanan sehingga sumber data masih minim

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAH AN PELAYANAN SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
	tahun 2013 sebesar Rp.638.741.487.000,- Modal sendiri Koperasi sebesar Rp. 409.532.429.000,- Modal luar sebesar Rp.100.362.982.000,-				
	Jumlah UMKM pada tahun 2016 = 16.428 unit dengan perincian per sektor usaha : Usaha Mikro = 5497 unit, Usaha Kecil = 8592 unit, Usaha Menengah = 2339 unit,	- Perbandingan jumlah bidang kegiatan ekonomi : a.yang erat dengan kegiatan ekonomi rakyat ; b. punya kekhususan proses teknologi; c. Bersifat padat karya; d. Mengandung nilai seni budaya khusus;	- Melakukan up dating database Koperasi dan UKM		- Keterbatasan anggaran/alokasi anggaran relatif kecil
					- Sumber daya aparatur yang terbatas berbanding dengan tingkat pertumbuhan Koperasi yang

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
					cukup signifikan
Jumlah Koperasi dan UKM yang mengikuti promosi	Jumlah Koperasi yang mengikuti promosi pada tahun 2015 = 10 Unit dan UKM =12 Unit, sedangkan pada tahun 2016 Koperasi yang mengikuti promosi sebanyak =3 Unit dan UKM= 28 Unit	- Tingkat pembinaan usaha besar dan menengah pada bidang produksi, pasar modal, manajemen, SDM dan teknologi Koperasi	- Melakukan pembinaan dan pelatihan terkait peningkatan mutu produk Koperasi dan UKM	- Kurangnya sinergitas antara Koperasi dan Dinas Koperasi dan UKM	- Keterbatasan anggaran/alokasi anggaran relatif kecil
		- Padat karya dan jadi mata pencaharian rakyat setempat			- Sinergitas dan kerjasama dengan program Nasional dan Kementerian
		- Usaha yang punya nilai seni budaya khusus dan turun temurun			
Prosentase Koperasi dan UKM yang diberikan fasilitasi pembiayaan	Koperasi yang mendapat bantuan = 0 unit, UKM = 0 unit	- Jumlah koperasi dan UKM yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan.	- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap jalannya usaha	- Orientasi mendirikan Koperasi dan UKM hanya untuk mendapatkan bantuan modal dan	- Keterbatasan anggaran/alokasi anggaran relatif kecil

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
			Koperasi dan UKM	bukan untuk pengembangan usaha sehingga usaha tidak berjalan maksimal	
		- Kemudahan dan kejelasan sistem dan prosedur	- Memfasilitasi dalam hal modal bantuan usaha		- Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses pembinaan dan pelayanan sehingga sumber data masih minim

Tabel 3.2
Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

NO.	ISU STRATEGIS			
	DINAMIKA INTERNASIONAL	DINAMIKA NASIONAL	DINAMIKA REGIONAL/LOKAL	LAIN-LAIN
1	2	3	4	5
1	Terbentuknya komitmen bersama tentang perkembangan Koperasi dan UKM	Teralokasinya dana kementerian yang dapat dimanfaatkan oleh Koperasi dan UMKM sbb :	- Pendalaman dan implementasi peraturan Kepala Daerah untuk mendorong tumbuh kembangnya pembinaan Koperasi dan UMKM	
		- Program Peningkatan Sarana Usaha Mikro di Sekolah @ Rp 50 juta	- Pemberian bantuan permodalan sebagai modal kerja dalam peningkatan usaha : perbengkelan, jahit-menjahit, bordir, laundry, pertukangan, dll	
		- Program UKM Mart @ Rp 65 juta		

NO.	ISU STRATEGIS			
	DINAMIKA INTERNASIONAL	DINAMIKA NASIONAL	DINAMIKA REGIONAL/LOKAL	LAIN-LAIN
1	2	3	4	5
		- Program Penataan Sarana Usaha Pedagang Kaki Lima @ Rp 375 juta	- Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat	
		- Program Bantuan Usaha Bidang Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha @ Rp 100 juta		
		- Program Bantuan Dana bagi Pengembangan Koperasi Wanita/Perkasa serta Koperasi Perkotaan dan Perdesaan @ Rp 50 juta		
		- Program Revitalisasi Pasar Tradisional Rp 900 juta		
		Pemanfaatan revitalisasi kelembagaan koperasi dalam bentuk regulasi yg dapat mendorong tumbuh kembangnya usaha Koperasi	- Peningkatan jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT, jumlah Koperasi sehat, dan jumlah Koperasi berprestasi	
			- Peningkatan kesejahteraan rakyat	
		Terselenggaranya event promosi dan pameran tingkat Nasional sebagai ajang pengenalan produk unggulan daerah (Koperasi dan UKM)	Fasilitasi promosi dan pameran pemanfaatan produk unggulan daerah (Koperasi dan UKM)	
			- Pameran Koperasi (diikuti oleh 2 Koperasi / event)	
			- Pameran UKM (diikuti oleh 2 UKM / event)	
2	Perluasan Pasar Non Tradisional	Perluasan pasar domestik	Pembentukan Koperasi dan UKM Mart	
			Perbaikan infrastruktur Koperasi dan UKM	
3	Diversifikasi Produk Koperasi dan UMKM	Pengelolaan Produk dan Jasa dengan pemanfaatan informasi dan teknologi	Pemanfaatan Informasi dan Teknologi untuk :	
			- Peningkatan kemampuan produksi	
			- Peningkatan	

NO.	ISU STRATEGIS			
	DINAMIKA INTERNASIONAL	DINAMIKA NASIONAL	DINAMIKA REGIONAL/LOKAL	LAIN-LAIN
1	2	3	4	5
			kemampuan distribusi dan pemasaran	
			- Peningkatan mutu produk	
			- Penciptaan lapangan kerja	
			- Penerapan merek dagang (label produk)	

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Makassar

Visi misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Makassar ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Makassar adalah **“Percepatan Mewujudkan Makassar KOTA DUNIA yang “SOMBERE’ & SMART CITY” dengan IMUNITAS KUAT untuk Semua”**. Adapun Misi Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Revolusi SDM dan Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi
2. Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan Imunitas Ekonomi dan Kesehatan Kota Yang Kuat Untuk Semua
3. Restorasi ruang Kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang “Sombere’ & Smart City “ untuk semua

Menelaah ketiga misi Walikota dan Wakil Walikota Makassar dihubungkan dengan pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Misi Ke 1 (Satu) adapun poin-poin sebagai berikut:

1. Revolusi PENDIDIKAN, semua harus sekolah
2. Perkuatan KEIMANAN UMMAT
3. 1000 Beasiswa “ANAK LORONG BERPRESTASI”
4. 10.000 Skill Training Gratis
5. Percepatan Tata Pemerintahan “SOMBERE’ & SMART Bersih dari Indikasi Korupsi
6. Menuju PAD Rp. 2 Trilyun

7. Menuju INSENTIF KINERJA RTRW Rp. 2 Juta dan Perkuatan Fungsi RTRW dan Penasehat Walikota serta Para Local Influencer
8. Kelurahan menjadi Pusat Pelayanan Publik yang “SOMBERE’ & SMART”

Dari poin-poin diatas misi 1 (satu) Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar terkait erat masuk pada **10.000 Skill Training Gratis** yaitu dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan keterampilan untuk program pemberdayaan usaha mikro sedangkan pada misi ke 2 (dua) adapun poin-poin sebagai berikut :

1. Gerakan Masyarakat Perkuat Imunitas Kesehatan dan Ekonomi
2. Perkuatan Fasilitas Perlindungan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
3. Penyediaan dengan Kemudahan Akses 100.000 Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru
4. Penataan Total Sistem BUMD dan Pembentukan Makassar Incorporation
5. Pembuatan Perda OMNIBUS “MAKASSAR KOTA DUNIA”
6. Percepatan Program JAGAI ANA’TA dan program SMART MILLENIA serta SOCIAL MITIGATION
7. Penataan Total DESTINASI BUDAYA dan SEJARAH
8. Penguatan CITY BRANDING dan peningkatan FESTIVAL dan MICE bulanan dalam skala nasional dan internasional

Pada poin-poin diatas Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar masuk di poin satu (1) **Gerakan Masyarakat Perkuat Imunitas Kesehatan Ekonomi**, dan juga pada poin ketiga (3) **Penyediaan dengan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru**. Misi ke 3 (ketiga) poin-poinnya sebagai berikut :

1. Penataan Total SISTEM PERSAMPAHAN
2. Pembenahan Total SISTEM PENANGANAN BANJIR dan PENANGANAN KEMACETAN
3. Pembangunan INFRASTRUKTUR dan KAWASAN “WATERFRONT CITY” berbasis MITIGASI dan ADAPTASI LINGKUNGAN
4. Peningkatan Jejaring SMART PEDESTRIAN dan KORIDON HIJAU KOTA
5. Peningkatan LORONG GARDEN dan Pembentukan 5000 LORONG WISATA
6. Percepatan Pembangunan Sistem dan Infrastruktur “SOMBERE’ & SMART CITY” yang Inklusif
7. Percepatan Makassar menjadi LIVEABLE CITY dan RESILIENT CITY
8. Pembangunan Gedung “SOMBERE’ & SMART” NEW BALAIKOTA & NEW DPRD

Berdasarkan poin-poin diatas di misi 3 Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar masuk pada poin kelima (5) **Peningkatan lorong garden dan**

pembentukan 5000 lorong wisata yaitu pengembangan kegiatan ekonomi lorong yang berbasis green, kuliner dan kerajinan.

Adapun permasalahan pelayanan yang ada di Dinas Koperasi dan UKM terkait dengan misi Kepala Daerah adalah :

- a. Revitalisasi kelembagaan Koperasi dimana Jumlah Koperasi yang aktif dan melakukan RAT masih sedikit yaitu 150 Koperasi dari total 1.118 Koperasi aktif
- b. Jumlah UMKM yang terstandarisasi tidak terealisasi di thn 2020 dengan adanya realokasi atau refocussing anggaran dari dampak Covid19
- c. Usaha pemasaran (promosi) dan distribusi produk belum maksimal dimana terhambat dari dampak Covid19
- d. Jumlah wirausaha baru masih rendah, tumbuh di tahun 2020 sebanyak 60 UKM

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan misi dan program adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan jumlah sumber daya aparatur yang memenuhi standar kecakapan dalam memberikan supervisi kepada Koperasi dan UMKM
- b. Terbatasnya pelatihan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dengan adanya physical distancing/PSBB
- c. Minimnya fasilitas pengembangan UMKM dalam pengembangan produksi dan pengolahan ,SDM serta desain dan teknologi
- d. Pengelolaan manajemen usaha yang masih bersifat konvensional
- e. Masih kurangnya event promosi produk unggulan Koperasi dan UMKM
- f. Orientasi mendirikan koperasi dan UKM semata-mata untuk mendapatkan bantuan modal dan bukan untuk pengembangan usaha

Faktor-faktor pendorong dalam pelaksanaan misi dan program sebagai berikut:

- a. Apresiasi masyarakat terhadap pertumbuhan Koperasi mendorong pemerintah untuk menyediakan tenaga aparatur yang handal dibidang Koperasi dan UMKM
- b. Program pemerintah memberikan 10.000 skill training gratis
- c. Program pemerintah memberikan Pengembangan UMKM dengan mengadakan lomba lorong antar kecamatan, dan pelatihan keterampilan
- d. Alokasi anggaran untuk kegiatan hibah peralatan usaha, pelatihan teknis dan keterampilan usaha

- e. Memaksimalkan event promosi produk unggulan Koperasi dan UMKM melalui penyediaan anggaran yang berkesinambungan
- f. Penyediaan dengan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Koperasi dan UKM Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota
Makassar

NO	MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1	Revolusi SDM dan Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi	- Revitalisasi kelembagaan Koperasi dimana Jumlah Koperasi yang aktif dan melakukan RAT masih sedikit yaitu 150 Koperasi dari total 1.118 Koperasi aktif	- Keterbatasan jumlah sumber daya aparatur yang memenuhi standar kecakapan dalam memberikan supervisi kepada Koperasi dan UMKM	- Apresiasi masyarakat terhadap pertumbuhan Koperasi mendorong pemerintah untuk menyediakan tenaga aparatur yang handal dibidang Koperasi dan UMKM
			-terbatasnya pelatihan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dengan adanya physical distancing/PSBB	-Program pemerintah memberikan 10.000 skill training gratis
2	Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan Imunitas Ekonomi dan Kesehatan Kota Yang Kuat Untuk Semua	- Jumlah UMKM yang terstandarisasi tidak terealisasi di thn 2020 dengan adanya realokasi atau refocussing anggaran dari dampak Covid19	- Minimya fasilitas pengembangan UMKM dalam pengembangan produksi dan pengolahan ,SDM serta desain dan teknologi	-Program pemerintah memberikan Pengembangan UMKM dengan mengadakan lomba lorong antar kecamatan, dan pelatihan keterampilan

NO	MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
			- Pengelolaan manajemen usaha yang masih bersifat konvensional	- Alokasi anggaran untuk kegiatan hibah peralatan usaha, pelatihan teknis dan keterampilan usaha
		- Usaha pemasaran (promosi) dan distribusi produk belum maksimal	- Masih kurangnya event promosi produk unggulan Koperasi dan UMKM	- Memaksimalkan event promosi produk unggulan Koperasi dan UMKM melalui penyediaan anggaran yang berkesinambungan
		-Jumlah wirausaha baru masih rendah,tumbuh di tahun 2020 : 60 UKM	-orientasi mendirikan koperasi dan UKM semata-mata untuk mendapatkan bantuan modal dan bukan untuk pengembangan usaha	-Penyediaan dengan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Pada dasarnya, penetapan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar merupakan bentuk pengembangan dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebelumnya dan dikaitkan dengan Renstra Kementerian/Lembaga maupun Renstra Provinsi.

Adapun Kebijakan, Program dan Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai berikut :

- a. Peningkatan akses pasar ekspor & fasilitas ekspor
- b. Peningkatan pengawasan dan perbaikan iklim usaha perdagangan luar negeri
- c. Peningkatan daya saing ekspor
- d. Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan Internasional
- e. Perbaikan Iklim usaha perdagangan Dalam Negeri
- f. Peningkatan kinerja sektor perdagangan besar & eceran dan ekonomi kreatif
- g. Peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumen

- h. Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dan Lembaga Layanan Pemasaran-Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLPKUKM)
 - i. Rencana Program/kegiatan Pembangunan lintas pelaku (stakeholder) termasuk di daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
 - j. Pelaksanaan koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, serta antar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Daerah (Propinsi/D.I. dan Kabupaten/Kota)
 - k. Penciptaan jaringan distribusi perdagangan yang efisien
- Kebijakan, Program dan Kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan :
- a. Peningkatan Koperasi yang memiliki Badan Hukum
 - b. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap jalannya usaha perkoperasian
 - c. Tersedianya sumber data dan informasi Koperasi dan UKM sebagai database dalam mendukung proses pembinaan dan pelayanan Koperasi dan UKM
 - d. Pengembangan KUMKM yang memiliki jaringan promosi nasional dan internasional
 - e. Pengembangan produk KUMKM sebagai produk unggulan ditingkat nasional
 - f. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan Pengusaha besar
 - g. Meningkatkan penyaluran bantuan usaha kepada pelaku UMKM yang mendukung pengembangan usaha

Kemudian, penetapan Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM dan Kota Makassar merupakan bentuk pengembangan dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebelumnya dan dikaitkan dengan Renstra Kementerian/Lembaga maupun Renstra Provinsi

Tabel 3.4

**Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar
terhadap Renstra SKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan Renstra
Kementerian/Lembaga**

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN RENSTRA KOTA	PADA SKPD	SASARAN PADA RENSTRA SKPD PROVINSI	SASARAN PADA RENSTRA RENSTRA KEMENTERIAN
1	2	3		4	5
1	Prosentase Koperasi yang aktif	Perkembangan koperasi aktif tahun 2016 :808 unit , tahun 2017 : 758 unit , tahun 2018 dan tahun 2019 : 1092 unit dan perkembangan koperasi di tahun 2020 :1.118 unit		Peningkatan Koperasi yang memiliki Badan Hukum	Rencana Program/kegiatan Pembangunan lintas pelaku (stakeholder) termasuk di daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	Persentase koperasi simpan pinjam yang sehat	Koperasi sehat di tahun 2016 : 45 unit, di tahun 2017: 70 unit, tahun 2018 :110 unit, tahun 2019 : 59 unit dan tahun 2020 : 90 unit		Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap jalannya usaha perkoperasian	Pelaksanaan koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, serta antar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Daerah (Propinsi/D.I. dan Kabupaten/Kota)
	Persentase pertumbuhan anggota aktif koperasi	Persentase pertumbuhan anggota aktif koperasi /koperasi baru di tahun 2020 : 26 koperasi			
2	Jumlah binaan UMKM yang meningkat Volume/omsetnya	Jumlah UMKM binaan yang meningkat volume/omsetnya di tahun 2020 : 25 UMKM dari target 50 UMKM		Tersedianya sumber data dan informasi koperasi dan UKM sebagai database dalam mendukung proses pembinaan dan	Rencana Program/kegiatan Pembangunan lintas pelaku (stakeholder) termasuk di daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN RENSTRA KOTA	PADA SKPD	SASARAN PADA RENSTRA SKPD PROVINSI	SASARAN PADA RENSTRA RENSTRA KEMENTERIAN
1	2	3		4	5
				pelayanan koperasi dan UKM	Menengah
	Jumlah Produk UMKM yang terstandarisasi	Dengan adanya pandemi covid19 realokasi anggaran sehingga tidak terealisasi			Tersedianya sumber data dan informasi koperasi dan UKM sebagai database dalam mendukung proses pembinaan dan pelayanan koperasi dan UKM
	Jumlah Wirausaha Baru	Jumlah wirausaha baru di tahun 2020 :35 UKM dari target 60 UKM			
	Jumlah Koperasi yang mendapatkan bantuan permodalan	Jumlah Koperasi yang mendapatkan bantuan permodalan di tahun 2020: 7 Koperasi dari target 5 koperasi		Meningkatnya penyaluran bantuan usaha kepada pelaku UMKM yang mendukung pengembangan usaha	Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dan Lembaga Layanan Pemasaran-Koperasi dan Usaha Kecil. dan Menengah (LLPKUMK)
	Jumlah UMKM yang mendapatkan bantuan permodalan	Jumlah UMKM yang mendapatkan bantuan permodalan di tahun 2020 :150 UKM dari target 150			
3	Jumlah Koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Jumlah Koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas di tahun 2016 : 2605, ditahun 2017 : 2862 ,ditahun 2018 : 1852 , ditahun 2019 : 2837 dan ditahun 2020 : 654Koperasi		Peningkatan Koperasi yang memiliki Badan Hukum	Rencana Program/kegiatan Pembangunan lintas pelaku (stakeholder) termasuk di daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN RENSTRA KOTA	PADA SKPD	SASARAN PADA RENSTRA SKPD PROVINSI	SASARAN PADA RENSTRA RENSTRA KEMENTERIAN
1	2	3		4	5
	Jumlah UKM mendapatkan Peningkatan kapasitas	Jumlah UKM mendapatkan peningkatan kapasitas di tahun 2016 : 2605, ditahun 2017 : 2862 ,ditahun 2018 : 1852 , ditahun 2019 : 2837 dan ditahun 2020 :2086 UKM			
4	Jumlah Koperasi yang mengikuti promosi	Dengan adanya pandemi covid19 realokasi anggaran sehingga tidak terealisasi		Pengembangan KUMKM yang memiliki jaringan promosi nasional dan internasional	Peningkatan akses pasar ekspor dan fasilitas ekspor
				Pengembangan produk KUMKM sebagai produk unggulan ditingkat nasional	Peningkatan daya saing ekspor
	Jumlah UMKM yang mengikuti promosi	Jumlah UMKM yang mengikuti promosi di tahun 2020 : 4 UMKM dari target 24 UMKM		Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan Pengusaha besar	Perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tata ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang yaitu suatu distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional.

RTRWK berfungsi sebagai:

- a. penyalaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta

b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. penataan ruang kawasan strategis kota

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

- a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa;
- b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional

Adapun hasil telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Makassar sebagai berikut :

TABEL 3.5
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Makassar

NO.	RENCANA POLA RUANG	POLA RUANG SAAT INI	INDIKATOR PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAN	PENGARUH RENCANA POLA RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPD	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD
1	2	3	4	5	6

1	Rencana Peningkatan Lorong Garde dan Pembentukan 5000 lorong wisata	Terdapat 15 kecamatan di Kota Makassar yang menempati kegiatan utama dan tempat-tempat didalam kota yang mengurangi eksistensi keindahan dan kebersihan kota	15 kecamatan memiliki kawasan lorong yang dapat diatur untuk peningkatan skala usaha	- Mengoptimalkan sebaran program binaan terhadap kegiatan usaha UMKM lorong ,masyarakat umum,ibu rumah tangga ,anak putus sekolah dan kader PKK	- Menyediakan tempat /lokasi usaha yang strategis namun sesuai RTRW / ketentuan lainnya - Meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap lokasi usaha yang strategis namun tidak melanggar ketentuan yang berlaku - Meningkatkan sinergitas antara pelaku usaha Mendorong pertumbuhan usaha Koperasi / UMKM dengan program kemitraan / bantuan modal usaha
---	---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

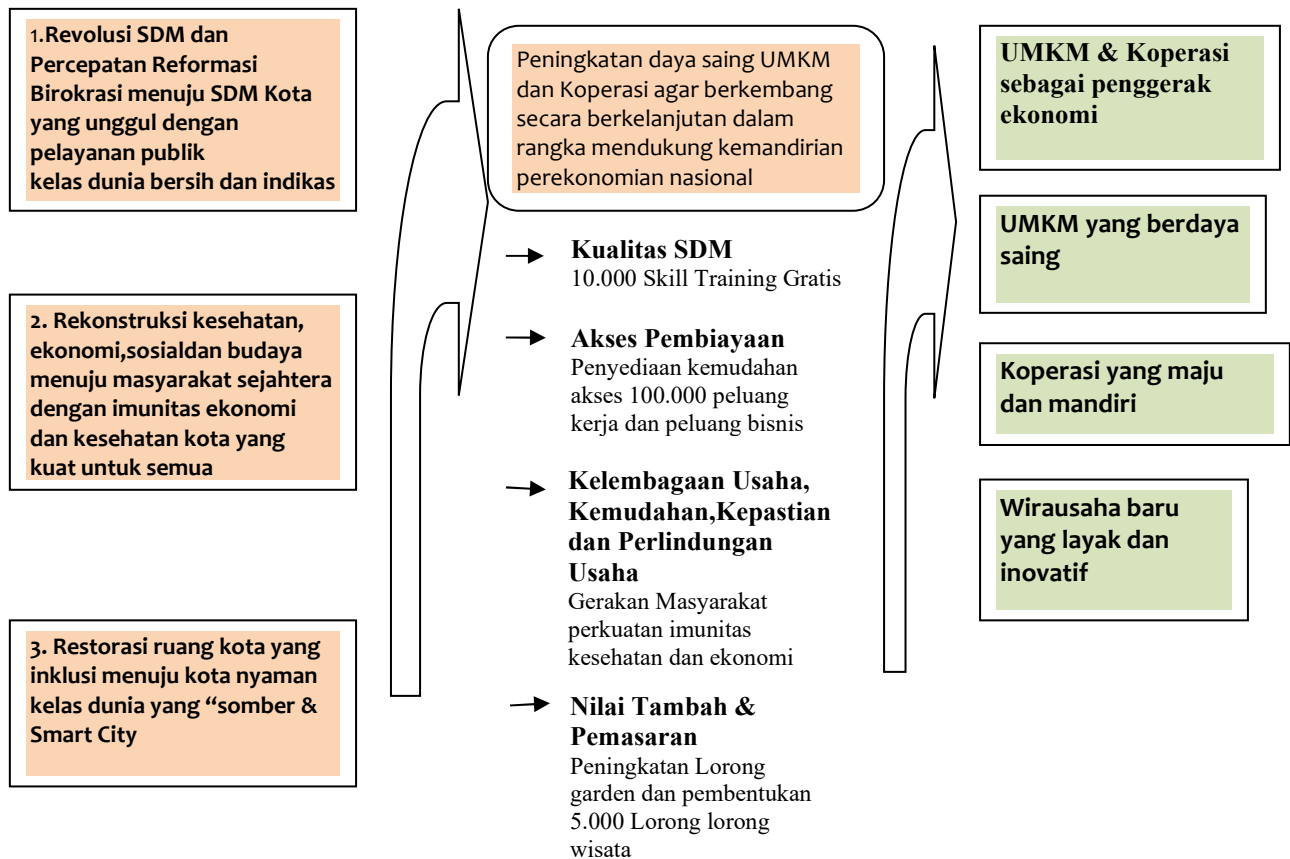
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam konteks pembangunan perekonomian yang mandiri dan berskala global, dimana Kota Makassar sebagai salah satu kawasan sentra industri, pusat kuliner dan menjadi tujuan wisata domestik dan internasional. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan adanya peningkatan publik baik lokal, regional, nasional dan internasional. Potensi lainnya berupa banyaknya pelaku ekonomi yang terpencah di Kota Makassar dengan jumlah yang setiap tahun bertambah sehingga belum tertangani secara optimal terutama sektor informal dan merupakan potensi ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi apabila berbasis ilmu Pengetahuan, Teknologi, Kreatif, Inovatif serta dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan.

3.5 Gambaran Pelayanan Koperasi dan UKM Kota Makassar

Gambar 3.1 dibawah ini merupakan Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.





Gambar 3.1 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.

Dari gambar tersebut di atas yang dianalisa dengan perkembangan pelayanan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diperoleh beberapa isu strategis antara lain:

- Pengembangan kegiatan ekonomi lorong yang berbasis green, kuliner dan kerajinan
- Pengembangan ekonomi kreatif/star up
- Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi
- Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
- Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil

3.6 Sasaran jangka menengah pada Renstra K / L

Melalui tujuan dan telaahan Renstra K/L maka sasaran sebagai berikut :

- Peningkatan kegiatan usaha koperasi dan UKM layak secara bisnis

- Penyediaan produk hasil usaha koperasi dan UKM yang bernilai tinggi ,daya saing tinggi dan memenuhi syarat dan standarisasi pasar
- Peningkatan kegiatan usaha koperasi dan UKM yang memiliki akses seluas-luasnya terhadap pengembangan sumberdaya (manusia) modal teknologi sesuai teknologi yang dimiliki
- Peningkatan kegiatan usaha koperasi dan UKM yang memiliki daya saing dalam perekonomian wilayah, nasional dan internasional
- Dukungan sinkronisasi tata ruang dan kemampuan menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan
- Pembuatan sentra-sentra usaha baru sesuai daya dukung dan potensi wilayah disetiap kecamatan
- Peningkatan kemudahan kepastian dan perlindungan untuk usaha konsumen dan produk

3.7 Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar memiliki sasaran jangka menengah sebagai berikut :

- Meningkatnya Lembaga Koperasi aktif dan Koperasi Sehat
- Meningkatnya UKM yang berkualitas
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelola keuangan perangkat daerah

3.8 Implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

Sesuai dengan telaahan Rencana tata ruang wilayah implikasi RTRW pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sebagai berikut :

- Pemetaan dan klasterisasi potensi lorong berbasis IT, berdasarkan minat potensi lorong untuk menentukan wisata lorong (potensi SDM dan potensi Lingkungan fisik)
- Pengembangan kegiatan ekonomi lorong yang berbasis green,kuliner dan kerajinan
- Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana untuk pengembangan ekonomi lorong berdasarkan potensi yang dimiliki

Isu-isu strategis pengembangan UMKM dianggap sulit untuk naik kelas sehingga adanya kendala terdiri masalah eksternal dan masalah internal, Adapun masalah eksternal isu pengembangan UMKM sebagai berikut ini :

1. Akses produk/jasa UMKM ke pasar domestik dan global;

2. Persaingan dengan Usaha Besar dan produk asing (Mutudan kapasitas produk/jasa UMKM);
3. Akses pembiayaan dan investasi ke UMKM;
4. Besaran nilai APBN/APBD untuk produk/jasa UMKM;
5. Kemudahan perizinan dan ekspor;

Masalah internal isu pengembangan UMKM sebagai berikut :

1. Kemampuan memaksimalkan pemasaran produk/jasa secara *online* dan *offline*;
2. Kemampuan melakukan inovasi produk/jasa termasuk *branding*;
3. Kemampuan mengakses sumber pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas produksi;
4. Pengetahuan tata cara ekspor;
5. Kemampuan ekspansi bisnis.

Dengan adanya isu pengembangan UMKM yang berdampak akibat dari pandemi Covid19 maka adanya perubahan struktur perekonomian berikut perubahan yang terjadi dalam perekonomian pasca covid19 :

- a. Perubahan bentuk rantai pasok global
- b. Perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi
- c. Inovasi teknologi dan ekonomi digital semakin berkembang pesat
- d. Perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat
- e. Percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi